NFO KOMERSIAL

...ngganan (bayar di depan) Rp 27.500 + Cempaka Minggu Ini ... Rp 32.000
...n/mmk : (bayar di depan belum termasuk PPN 10%)
...Display ... Rp 10.000
...harga sampai dengan 300 mm / kolom ... Rp 6.000
...300 mm / kolom ... Rp 7.500
...sampai dengan 300 mmk) ... Rp 5.
...300 mmk ... Rp 7.
...koloman (20 mmk s/d 150 mmk) ... Rp 5.500
...150 mmk ... Rp 10.000
...harga khusus (1 x 50 mmk) ... Rp 100.000
...warna :
...> 600 mmk Rp 12.000
...≤ 600 mmk Rp 17.500
...> 600 mmk Rp 15.000
...Pariwara
...14 halaman per mmk Rp 10.000

Halaman Istimewa
Halaman I + 300
Halaman XII + 100
Halaman lain yang mengikat + 25 %

MILIK PERPUSTAKAAN BIDANG SKIPAM BADIKLAT YOGYAKARTA

SUARA MERDEKA

INDEPENDEN - OBJEKTIF - TANPA PRASANGKA

■ INFO PELANGGAN

• Redaksi 024-580900 (5 saluran) dan 581925 Fax (024) 580605
• Redaksi kota 024-412600
• Departemen Sirkulasi/Tata usaha 024-412600
• Departemen Iklan 024-411116

• JAKARTA (021) 322976, 310104-0 • SURABAYA (031) 8413932, 8413932,8420751 • SURAKARTA (0271) 46619, Fax 632808 • YOGYAKARTA (0274) 376455, Fax 373115 • PURWOKERTO (0281) 35467, Fax 31697 • CILACAP (0282) 33509 • PURBALINGGA (0281) 91404 • KLATEN (0272) 25657 • WONOGIRI (0273) 21311 • SRAGEN (0271) 91522 • BOYOLALI (0276) 21307 • MAGELANG (0293) 63637, Fax 63637 • PURWOREJO (0275) 22880 • KEBUMEN (0287) 82480 • WONOSOBO (0286) 22553 • TEGAL (0283) 53494, Fax 53494 • KUDUS (0291) 441091, Fax 35691 • BLORA (0296) 32463 • PEKALONGAN (0285) 24123, Fax 24123

KAMIS PAHING, 16 JULI 1998 | TAHUN XLIX No. 151 • TERBIT 12 HALAMAN • ISSN 0215-5123 | HARGA ECERAN Rp 1.300

Dan Puspom Belum Periksa Prabowo

• Tergantung Pemeriksaan Sejumlah Tersangka

• Jangan Polemikkan Keterlibatan Kopassus

JAKARTA - Komandan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal mengatakan, hingga kini belum memeriksa mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto. Namun kemungkinan memeriksa tergantung pada pemeriksaan sejumlah tersangka kasus penculikan aktivis yang sedang berlangsung.

Sementara Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif meminta keterlibatan anggota Kopassus dalam kasus penculikan dan orang hilang jangan dijadikan polemik secara sepihak. Dia berjanji akan mengusut kasus tersebut sesuai dengan prosedur hukum.

"Pengusutan masalah ini, persoalannya tak hanya memuaskan orang, tapi yang terpenting adalah kesediaan ABRI secara ksatria mengungkapkan adanya tindakan oknum yang salah. Katakanlah jika memang di tubuh ABRI ada kesalahan kita menyiapkan Mahkamah Militer," ujar Kapuspen di sela-sela menghadiri peresmian penerimaan jabatan guru besar ilmu sosial dan politik pada Prof Dr A Ramlan Surbakti, di kampus Unair, Surabaya, kemarin.

Menurut Syamsu, sebaiknya tunggu saja nanti pemeriksaan kelanjutan. "Kita kan masih memeriksa terus," ujarnya. Berikut petikan wawancara dengan Syamsu.

Apakah benar ada perintah penculikan itu?

Penculikan itu tidak ada perintah dari Pangab. Jangan dibilang itu dilakukan oleh institusi-institusi, karena ini dilakukan oknum. Kita berani, sebagai manusia yang bertakwa pada Tuhan YME, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Makanya Menhankam/Pangab berani mengungkap mana yang salah dan mana yang benar, walaupun itu pahit sekalipun. Ibarat pil, karena untuk menyembuhkan tetap diminum, kalau manis tapi racun tetap kita buang.

Disebut-sebut ada keterkaitan institusi lain?

Keterkaitan institusi lain sudah kita periksa seperti kodim, kodam. Makanya tunggu saja. Pemeriksaan terus berlanjut. Dia dapat perintah dari siapa, itu yang kita telusuri.

Pangkat tertinggi?

Perwira. Perwira itu mulai dari pama hingga pati, kita ini menjalankan perintah Pangab. PM (prada) yang berdiri di jalan itu juga menjalankan perintah Pangab. Secara struktural, para bintang itu kalau bertemu PM harus hormat karena ia mewakili Pangab. Tapi tentu saja ada etikanya.

Kalau pemeriksaan/penyidikan?

Kalau untuk memeriksa bintang, pamen juga sudah cukup.

Ada relevansinya Danjen terdahulu diperiksa?

Sekarang kita sedang menyelidikinya. Kalau dari pemeriksaan ternyata harus diperiksa ya kita periksa. Kalian tunggulah. Saya kadang-kadang memberikan komentar ditanggapi lain dan ada juga yang menulisnya lain.

Di internet santer berita itu, benarkah?

Isu-isu di internet itu jangan digubrislah. Dia bisa sebut orang terlibat tidak berdasarkan hasil pengusutan kita. Karena itu jangan sembarangan menyebut orang lain terlibat. Kontras bilang koramil, kodim, kodam terlibat harus ada faktanya, tidak bisa hanya katanya-katanya. Oknumnya saja yang terlibat, bukan institusinya.

Sekarang ada orang yang belum dikembalikan. Apa yang dilakukan Puspom?

Saya sudah minta Kontras untuk membantu, kita ungkap itu. Saya sudah bilang, kalau ada kejahatan kita wajib cegah dan ungkapkan lewat tangan/kekuatan, Kalau tidak dengan omongan, kalau tidak bisa dengan doa dan itu selemah-lemahnya

(Bersambung hlm XI kol 4-6)

SALAM REFORMASI !
Jika Sakit Kepala
Cari Biogesic Segera!
BACA ATURAN PAKAI JIKA SAKIT BERLANJUT HUBUNGI DOKTER
PT Medifarma Laboratories
4 TABLET
BIOGESIC
MEMBERSIHKAN
Sakit Kepala · Nyeri · Demam
Asetaminofen 500 mg
Reg. No. DBL 8914705051041

Habibie: Tak Akan Ulangi Kesalahan Pada Masa Lalu

Soal Bantuan IMF

JAKARTA - Presiden BJ Habibie menyatakan, bantuan IMF untuk Indonesia tak akan mubazir. Ia tidak akan melakukan kesalahan seperti pada lalu. Hal itu disampaikan di depan para ulama dan pengasuh pondok pesantren se-Indonesia di Balai Pertemuan Pondok Pesantren As-Syafiiyah, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur, kemarin.

"Mereka harus tahu, uang (bantuan IMF) yang jika dijumlahkan seluruhnya sekitar 50 miliar dolar AS tidak mubazir. Tidak dimanfaatkan untuk melanjutkan kesalahan-kesalahan masa lalu," katanya. Pengucuran dana bantuan IMF berkali-kali ditunda akibat perkembangan di Indonesia yang memburuk belakangan ini.

Menurut Habibie, negara-negara lain yang membantu Indonesia pada hakikatnya juga membantu dirinya sendiri. Sebab, dengan itu akan mengembalikan mitra dagang nya menjadi kuat kembali. Dengan penduduk 210 juta orang, Indonesia memang merupakan pasar potensial bagi negara-negara pemberian bantuan tersebut.

Meski demikian, dia menilai wajar dan bijaksana jika pemberi bantuan mempunyai hak menilai, apakah pemerintah Indonesia dan bangsa ini memiliki kredibilitas, sehingga mereka bisa memberikan yang kita inginkan.

Disebutkannya, telah menerima informasi bahwa G7, dan negara-negara donor lainnya Rabu tengah malam atau 57 hari setelah dia menjabat presiden, akan memutuskan pencairan bantuan tahap berikutnya kepada Indonesia.

"Kita harus sadari, ini hanya mungkin karena dalam waktu singkat kita mampu mengembangkan kredibilitas di bidang politik berdasarkan HAM." Dengan pencairannya bantuan tersebut, dia punya harapan, dalam waktu satu tahun, yakni September tahun depan, rupiah yang saat ini berkisar 40%-50% akan mampu di bawah 10%.

Bunga Tinggi

Namun untuk tujuan itu, suku bunga tinggi atau kebijakan uang ketat akan dipertahankan. Sedangkan untuk bahan-bahan kebutuhan pokok, Pemerintah akan memberikan perlakuan khusus.

Melalui program itu, insya Allah bulan September tahun kita merasakan ada sedikit perbaikan. Insya Allah September tahun berikutnya (1999), kita sudah mencapai sasaran awal, yakni stabilitas ekonomi, nilai tukar, kualitasnya tinggi."

Nilai rupiah, menurutnya, ditentukan oleh suku bunga yang rendah. Kedua, harga rupiah terhadap valuta asing konstan. Kalaupun ada perubahan kecil.

Ia menjelaskan, menghadapi krisis ekonomi, pemerintah tahun lalu telah membentuk tiga organisasi, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), penyelesaian utang luar negeri swasta dan BPPN. Ketiga organisasi itu secara proaktif telah melakukan berbagai perundingan nasional, regional,

Pejabat Bank Dunia Tak Bisa Tidur

■ Pikirkan Krisis Ekonomi Indonesia

NEW YORK - Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, Dennis de Tray, mengaku nyaris tidak bisa tidur memikirkan mengapa krisis ekonomi yang melanda Indonesia begitu buruk, sampai-sampai jutaan orang harus menderita karenanya.

"Percayalah, saya menghabiskan malam demi malam untuk merenung dan berpikir. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah makin menderitanya berjuta-juta orang? Mungkin saya akan memikirkannya sampai akhir masa hidup saya," kata De Tray, seperti dikutip harian *The Wall Street Journal* yang terbit di AS, Selasa.

Bank Dunia baru saja menginjeksi dana bantuan modal baru untuk Indonesia, khususnya untuk program yang berhasil mengatasi kemiskinan puluhan juta orang.

Selama tiga dekade belakangan ini, Bank Dunia memberikan bantuan lebih dari 25 miliar dolar AS. Namun dalam tempo kurang dari dua tahun, akibat krisis ekonomi, jumlah orang miskin di Indonesia membengkak lagi.

"Setiap kali bangun pagi, kami harus merenung apakah kebijakan yang kami putuskan itu akan membawa kebaikan atau justru lebih memperburuk keadaan," kata ahli ekonomi lulusan Universitas Chicago itu, yang telah empat tahun memimpin 150 staf Bank Dunia di Jakarta.

Tetap Tanggung Jawab

Dalam perkembangan sejarah pembangunan Indonesia, bantuan Bank Dunia tampaknya sangat positif. Tak bisa disangkal lagi, Bank Dunia khususnya pada awal-awal masa Orde Baru telah membantu mendorong Indonesia ke arah modernisasi.

(Bersambung hlm XI kol 1)

TOTAL HADIAH TABUNGAN BDN
YA HANG
Mulai 1 Juli 1998
Hubungi Kantor Cabang BDN Terdekat.

Dubes AS Akui Bantu Dana 26 Juta Dolar kepada LSM

JAKARTA - Dubes AS untuk Indonesia, Stapleton J Roy, mengakui pemerintahnya telah mengucurkan dana 26 juta dolar kepada sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di negeri ini. Namun tak benar jika dikatakan bantuan itu untuk membiayai aksi-aksi kerusuhan belakangan ini. Apalagi untuk kegiatan separatis di Irian Jaya dan Timtim.

Pengakuan Dubes AS tersebut disampaikan ketika mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPA, kemarin. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPA Yusuf Syakir mengonfirmasikan pemberitaan Harian *New York Times* beberapa waktu lalu, yang menyatakan Pemerintah AS mengucurkan dana bantuan senilai 26 juta dolar bantuannya kepada Bappenas, termasuk daftar bantuan itu diberikan kepada Bappenas," katanya menirukan ucapan Dubes Roy.

"Kami juga kaget ketika mendengar ini. Sekarang baru kita tahu dan kita minta Bappenas mengumumkan siapa-siapa saja yang mendapatkan bantuan itu," ujarnya.

Menurut pendapat Dubes J Roy, Pemerintah AS tetap teguh pada pendiriannya, yakni Timtim adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Tawaran otonomi khusus terhadap provinsi ke-27 Indonesia itu patut dipertimbangkan.

"Kebijakan kami tetap sama, Indonesia memiliki 27 provinsi dan Timtim merupakan bagian integral Negara